

**SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA  
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DI DESA SUNGAI JANJAM  
KECAMATAN BABIRIK**

**Selamat Riadi, Rahmiyati Thayyibah, Rini Andreani, Syahnor Rifa'i, Widya Sari, Dicki  
Andi Heriadi**

Program Studi S1 Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

e-mail : selamatriadi077@gmail.com

**Abstrak**

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang memiliki dampak terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif dan partisipatif. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, dan recycle (3R). Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan, terutama rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di tingkat desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik melalui sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, edukasi partisipatif, diskusi kelompok, dan simulasi pemilahan sampah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah, pentingnya pemilahan sampah, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini diharapkan mampu mendukung efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pengelolaan Sampah, Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat

**Abstract**

*Waste management has become a strategic issue in sustainable development due to its significant impact on public health, environmental quality, and ecosystem sustainability. Local governments play a crucial role in formulating and implementing effective and participatory waste management policies. The Government of Hulu Sungai Utara Regency has issued Regional Regulation Number 16 of 2013 on Waste Management as a legal framework for reduce, reuse, and recycle (3R)-based waste management. However, the implementation of this policy still faces challenges, particularly low public awareness and participation at the village level. This community service activity aims to enhance public understanding and awareness in Sungai Janjam Village, Babirik District, through policy socialization. The methods applied include socialization, participatory education, group discussions, and waste sorting simulations. The results indicate an improvement in community knowledge regarding waste management, the importance of waste sorting, and*

*active participation in maintaining environmental cleanliness. This activity is expected to strengthen policy implementation effectiveness and encourage sustainable behavioral change.*

**Keywords:** *Public Policy, Waste Management, Socialization, Community Participation*

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang terus menjadi perhatian pemerintah di berbagai tingkatan. Peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, serta perkembangan ekonomi masyarakat menyebabkan volume dan jenis sampah semakin beragam. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan sampah, terutama di wilayah pedesaan yang masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta menurunnya kualitas hidup.

Dalam perspektif administrasi publik, pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis kebersihan semata, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang mampu mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan serta tingkat partisipasi masyarakat.

Kebijakan pengelolaan sampah juga berkaitan erat dengan konsep good governance yang menekankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan top-down tanpa melibatkan masyarakat sering kali tidak efektif, karena masyarakat sebagai penghasil utama sampah memiliki peran kunci dalam proses pengurangan dan pengelolaan sampah. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan partisipatif dan edukatif agar masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan hukum dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah. Selain itu, regulasi tersebut menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle).

Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan, kurangnya kesadaran lingkungan, serta terbatasnya akses informasi terkait pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku masyarakat. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dan praktik di lapangan.

Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik. Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian masyarakat masih membuang sampah sembarangan, belum melakukan pemilahan sampah rumah tangga, serta kurang memahami dampak jangka panjang dari pengelolaan sampah yang tidak tepat. Selain itu, belum terbentuknya sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat menunjukkan perlunya intervensi edukatif dan sosialisasi kebijakan.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, membangun kesadaran lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

## **TARGET DAN LUARAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki target utama yaitu masyarakat Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik sebagai kelompok yang berperan langsung dalam produksi dan pengelolaan sampah rumah tangga. Sasaran kegiatan meliputi aparat desa, tokoh masyarakat, kader lingkungan, serta kelompok ibu rumah tangga yang memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku pengelolaan sampah di tingkat keluarga. Pendekatan ini dipilih karena pengelolaan sampah yang efektif harus dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami kebijakan publik terkait pengelolaan sampah. Pemahaman yang baik diharapkan mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Luaran yang diharapkan meliputi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah, perubahan perilaku dalam pemilahan sampah, serta pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Kegiatan ini juga diharapkan mendorong terbentuknya sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Sungai Janjam. Sistem ini dapat berupa kelompok pengelola sampah, bank sampah, atau kegiatan daur ulang sederhana yang dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Luaran akademik dari kegiatan ini berupa laporan pengabdian kepada masyarakat dan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional. Hal ini penting sebagai bentuk kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan lingkungan di tingkat lokal.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi model praktik baik bagi desa lain di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pengelolaan sampah berbasis kebijakan daerah. Dengan adanya diseminasi hasil kegiatan, diharapkan praktik pengelolaan sampah yang efektif dapat direplikasi di wilayah lain.

Secara jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek lingkungan hidup, kesehatan, dan partisipasi masyarakat.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui penyampaian informasi, tetapi juga melalui proses interaksi, diskusi, dan refleksi bersama.

- a. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pemerintah desa, identifikasi kebutuhan masyarakat, serta penyusunan materi sosialisasi. Koordinasi

dilakukan untuk memastikan dukungan pemerintah desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan.

- b. Tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan melalui penyampaian materi terkait isi Peraturan Daerah, pentingnya pengelolaan sampah, serta dampak lingkungan dan kesehatan. Materi disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat.
- c. Tahap ketiga adalah diskusi kelompok dan refleksi bersama. Masyarakat diajak untuk mengidentifikasi permasalahan pengelolaan sampah yang mereka hadapi serta mencari solusi bersama. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan.
- d. Tahap keempat adalah simulasi pemilahan sampah rumah tangga. Simulasi dilakukan untuk memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik.
- e. Tahap kelima adalah evaluasi melalui tanya jawab dan umpan balik. Evaluasi bertujuan mengetahui tingkat pemahaman dan perubahan sikap masyarakat setelah kegiatan.
- f. Tahap terakhir adalah tindak lanjut berupa rekomendasi pembentukan kelompok pengelola sampah berbasis masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi, tingkat pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah masih rendah. Hal ini terlihat dari praktik pengelolaan sampah yang masih konvensional dan kurang memperhatikan aspek lingkungan.

Setelah kegiatan berlangsung, masyarakat menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya pengurangan sampah, pemilahan sampah, serta pengelolaan sampah organik. Masyarakat juga mulai memahami bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Diskusi interaktif menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas. Hal ini menjadi indikator bahwa pendekatan partisipatif efektif dalam membangun kesadaran. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Tanpa pemahaman masyarakat, kebijakan sulit diimplementasikan.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan pengelolaan sampah. Masyarakat yang terlibat aktif lebih cenderung mengubah perilaku. Selain itu, kegiatan ini berpotensi meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam penguatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa.

### Dokumentasi Kegiatan



### SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah berbasis kebijakan publik. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar masyarakat belum memahami substansi regulasi daerah serta belum menyadari bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara partisipatif dan interaktif, terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai konsep pengurangan sampah, pemilahan sampah, serta dampak lingkungan dan kesehatan dari pengelolaan sampah yang tidak tepat. Masyarakat juga mulai memahami bahwa kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya

berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga pada perubahan perilaku dan budaya masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Selain itu, kegiatan ini mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan mendorong partisipasi aktif dalam mendukung implementasi kebijakan daerah. Diskusi yang dilakukan menunjukkan adanya komitmen awal masyarakat untuk menerapkan praktik pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih ramah lingkungan. Hal ini menjadi indikator bahwa pendekatan sosialisasi kebijakan yang berbasis partisipasi dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Dalam perspektif administrasi publik, kegiatan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama. Oleh karena itu, sosialisasi kebijakan merupakan instrumen strategis dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak awal dalam membangun fondasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Sungai Janjam. Namun, keberlanjutan program dan dukungan kelembagaan menjadi faktor penting dalam memastikan perubahan perilaku masyarakat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

---

## **SARAN**

Berdasarkan hasil kegiatan, disarankan agar pemerintah desa bersama pemerintah daerah terus melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan terkait pengelolaan sampah. Upaya ini penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat dan mendorong perubahan perilaku yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Selain itu, perlu adanya penguatan kelembagaan di tingkat desa melalui pembentukan kelompok pengelola sampah, bank sampah, atau kader lingkungan yang berperan sebagai agen perubahan. Kelembagaan tersebut dapat menjadi motor penggerak dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Pemerintah desa juga diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana pendukung, seperti tempat pemilahan sampah, fasilitas pengumpulan sampah, serta program pengelolaan

sampah organik. Dukungan infrastruktur akan memperkuat efektivitas kebijakan dan memudahkan masyarakat dalam menerapkan praktik pengelolaan sampah.

Di sisi lain, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Pendekatan kolaboratif akan meningkatkan keberlanjutan program dan memperluas dampak positif bagi masyarakat.

Kegiatan pengabdian selanjutnya dapat diarahkan pada pendampingan pengelolaan sampah berbasis ekonomi, seperti pengembangan bank sampah, daur ulang, dan pengelolaan sampah organik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Penelitian dan pengabdian lanjutan juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan dapat terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik yang telah memberikan izin, dukungan, dan fasilitasi sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh aparat desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Sungai Janjam yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dukungan kelembagaan sangat penting dalam mendorong kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan masyarakat.

Selain itu, terima kasih disampaikan kepada seluruh anggota tim pengabdian yang telah bekerja sama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan kegiatan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R., & Nugroho, R. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145–156.
- Bappenas. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Damanhuri, E., & Padi, T. (2019). *Pengelolaan sampah terpadu*. ITB Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga*. KLHK.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2018). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Nugroho, R. (2020). *Public policy: Teori dan praktik kebijakan publik di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Suryani, A., & Pratama, R. (2022). Community participation in waste management: A case study in rural areas. *Journal of Environmental Management*, 305, 114–125.
- United Nations. (2021). *Sustainable development goals report 2021*. United Nations.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS.
- World Bank. (2018). *What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050*. World Bank.